

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembayaran digital berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan berubahnya kebiasaan masyarakat yang mengutamakan transaksi cepat, praktis, dan efisien. Pergeseran sistem pembayaran dari tunai menuju non tunai melalui berbagai bentuk pembayaran digital dipahami sebagai sebuah transformasi yang memperluas akses layanan keuangan dan meningkatkan efisiensi transaksi, meskipun masih menyisakan tantangan seperti aspek keamanan dan pemerataan akses (Fahimah & Harsono, 2023). Pembayaran digital kini menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi modern dan terus membentuk pola transaksi baru di berbagai negara.

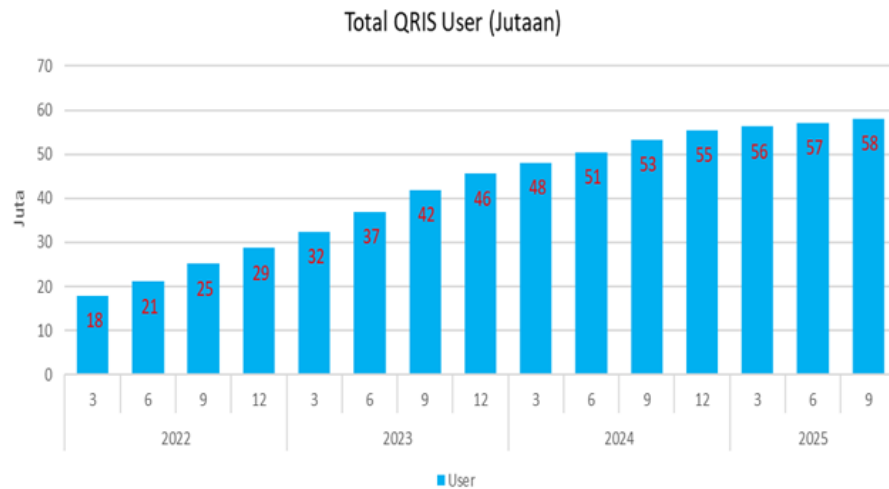
Pembayaran berbasis kode respons cepat (QR) menjadi salah satu bentuk pembayaran digital yang semakin populer digunakan. Dalam konteks QR *mobile payment*, pembayaran QR dilaporkan meningkat popularitasnya karena untuk menggunakannya hanya memerlukan smartphone, sehingga memudahkan pengguna melakukan transaksi (Islam et al., 2024). Dengan demikian, pembayaran berbasis QR relevan diposisikan sebagai opsi pembayaran non tunai yang mudah dijangkau dalam aktivitas transaksi sehari-hari.

Penggunaan berulang pembayaran digital dapat membentuk kebiasaan bertransaksi non tunai. Penelitian pada e-wallet menunjukkan bahwa kebiasaan berpengaruh terhadap *continuance intention*, yakni kecenderungan pengguna untuk

tetap memakai layanan pembayaran setelah pengalaman awalnya (Yatun & Sari, 2024). Temuan ini menegaskan bahwa adopsi *cashless* tidak hanya didorong manfaat, tetapi juga rutinitas transaksi yang semakin terbentuk dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

Terbentuknya kebiasaan bertransaksi non tunai mendorong UMKM untuk memilih instrumen pembayaran yang praktis dan mudah digunakan dalam berbagai situasi transaksi, termasuk pada pembelian kebutuhan harian seperti kuliner. Bank Indonesia menjelaskan QRIS sebagai standar nasional QR Code pembayaran yang dirancang untuk memudahkan transaksi lintas penyedia layanan sehingga pembayaran berbasis QR dapat digunakan lebih luas dan terintegrasi (Bank Indonesia, 2025.). Dengan demikian, QRIS dapat dipahami sebagai bentuk standardisasi yang memperkuat pergeseran transaksi ritel menuju metode non tunai serta memudahkan dalam melakukan pembayaran.

Penggunaan pembayaran non tunai melalui QRIS menjadi salah satu indikator penting dalam melihat perkembangan adopsi pembayaran digital di Indonesia. Data Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) menunjukkan bahwa jumlah pengguna QRIS terus meningkat dari waktu ke waktu, sehingga menggambarkan semakin meluasnya pemanfaatan QRIS di masyarakat (ASPI, 2025). Berdasarkan data ASPI tersebut, berikut disajikan data jumlah pengguna QRIS dalam bentuk grafik untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pertumbuhannya:



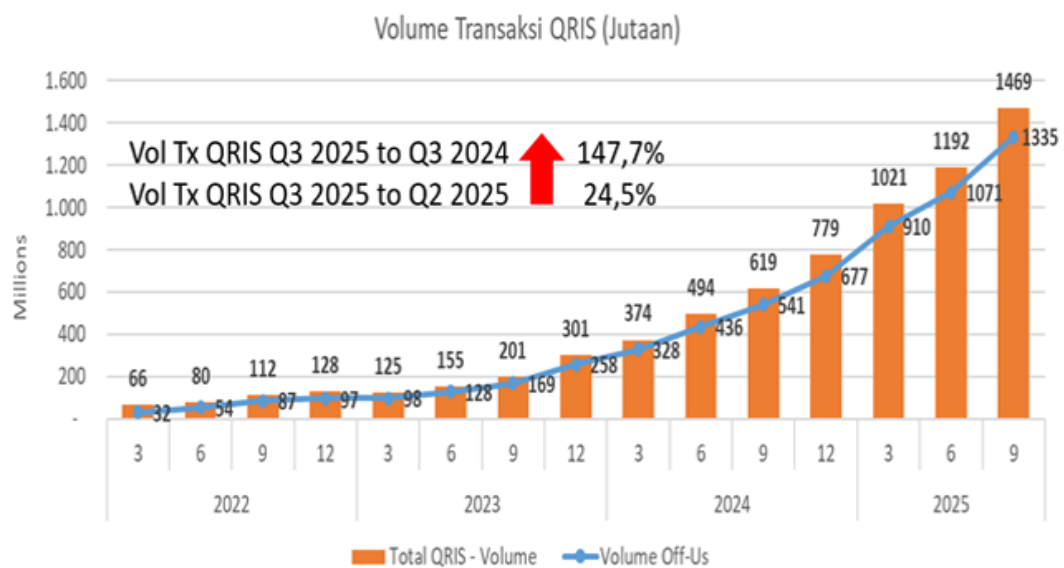
Sumber: <https://aspi-indonesia.or.id/statistik-qris,2025>.

Gambar 1. 1
Total Pengguna QRIS di Indonesia

Merujuk pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah pengguna QRIS mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun 2022 hingga 2025. Pada tahun 2022, jumlah pengguna QRIS naik dari 18 juta (Maret) menjadi 29 juta (Desember), lalu terus bertambah pada tahun 2023 dari 32 juta (Maret) menjadi 46 juta (Desember). Tren kenaikan berlanjut pada tahun 2024, yakni dari 48 juta (Maret) menjadi 55 juta (Desember), dan pada tahun 2025 meningkat lagi dari 56 juta (Maret) hingga mencapai 58 juta (September) (ASPI, 2025). Peningkatan yang berkelanjutan ini menunjukkan bahwa adopsi QRIS di masyarakat semakin meluas dan penggunaan pembayaran berbasis QR semakin melekat dalam aktivitas transaksi non tunai sehari-hari.

Indikator lain yang penting untuk menggambarkan tingkat pemanfaatannya adalah volume transaksi QRIS, karena data ini menunjukkan seberapa sering QRIS benar-benar digunakan dalam aktivitas pembayaran. Oleh karena itu, data volume

transaksi QRIS selama periode 2022 hingga 2025 disajikan pada gambar berikut untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan intensitas volume transaksi QRIS dari waktu ke waktu.



Sumber: <https://aspi-indonesia.or.id/statistik-qr,2025>.

Gambar 1. 2
Volume Transaksi QRIS di Indonesia

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa volume transaksi QRIS mengalami peningkatan yang konsisten sejak 2022 hingga 2025 dan cenderung semakin tajam pada periode terakhir. Pada 2022, volume transaksi naik bertahap dari 66 juta (Maret) menjadi 128 juta (Desember). Tren kenaikan berlanjut pada 2023 dari 125 juta (Maret) menjadi 301 juta (Desember), kemudian meningkat lagi pada 2024 dari 374 juta (Maret) menjadi 779 juta (Desember). Peningkatan paling besar terlihat pada 2025, yaitu dari 1.021 juta (Maret) menjadi 1.192 juta (Juni) dan mencapai 1.469 juta (September) setara sekitar 1,021 miliar, 1,192 miliar, dan 1,469 miliar

transaksi. Selain itu, pada grafik dicantumkan pertumbuhan Q3 2025 terhadap Q3 2024 sebesar 147,7% serta Q3 2025 terhadap Q2 2025 sebesar 24,5%, yang menunjukkan intensitas penggunaan QRIS dalam transaksi non-tunai semakin meluas dan semakin sering digunakan dalam aktivitas pembayaran non tunai (ASPI, 2025).

Peningkatan penggunaan QRIS membuat aspek keamanan menjadi pertimbangan penting karena transaksi melibatkan data dan otorisasi digital. Keamanan terbukti berpengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat menggunakan QRIS (Safitri & Fihartini, 2024). Dalam konteks UMKM, rasa aman dapat memengaruhi keputusan untuk menggunakan atau menyediakan QRIS sebagai metode pembayaran usaha. Jika UMKM menilai transaksi QRIS aman, keputusan penggunaan QRIS cenderung semakin kuat. Sebaliknya, jika UMKM meragukan keamanan transaksi, penggunaan QRIS dapat menjadi lebih terbatas. Oleh karena itu, persepsi keamanan relevan dibahas sebagai faktor yang memengaruhi keputusan penggunaan QRIS pada transaksi UMKM sektor kuliner.

Penelitian ini memanfaatkan statistik Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pusat koordinasi penanganan scam. Statistik tersebut merekam jumlah pengaduan, nilai kerugian, serta dana yang berhasil diblokir, sehingga dapat menggambarkan masih adanya risiko keamanan dalam transaksi digital. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi rasa aman UMKM dalam menggunakan atau menyediakan instrumen pembayaran digital, termasuk QRIS. Karena itu, Tabel 1.1 menggunakan rekap Januari–September 2025

dari Statistik Berkala Bidang PEPK OJK September 2025 sebagai dasar pembahasan persepsi keamanan (OJK, 2025).

Tabel 1. 1
Ringkasan Data IASC: Laporan, Kerugian, dan Dana Diblokir Terkait
Penipuan Transaksi Digital (Jan–Sep 2025)

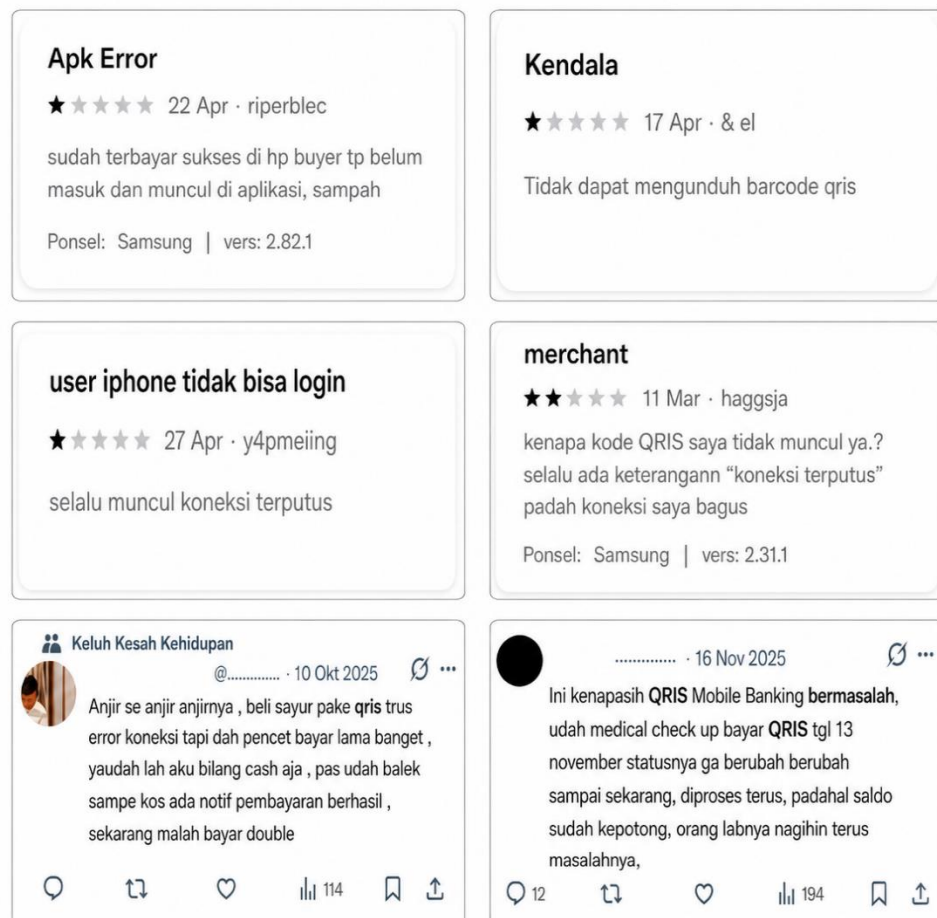
Keterangan	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25
Jumlah Laporan diterima (kasus)	17,517	40,229	61,966	87,239	117,573	148,475	188,104	221,685	256,368
Kerugian dilaporkan (Rp Miliar)	343,4	733,7	1,400	1,900	2,400	3,100	3,800	4,500	5,800
Dana diblokir (Rp Miliar)	19,1	39,9	47,0	51,3	75,8	257,5	261,1	263,1	287,0

Sumber: <https://www.ojk.go.id/id>, Diolah Peneliti Januari 2026.

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah laporan penipuan transaksi digital meningkat dari 17.517 kasus pada Januari 2025 menjadi 256.368 kasus pada September 2025. Sejalan dengan itu, kerugian yang dilaporkan juga naik dari Rp343,4 miliar menjadi Rp5.800 miliar, sedangkan dana yang berhasil diblokir meningkat dari Rp19,1 miliar menjadi Rp287,0 miliar (OJK, 2025). Namun, besarnya kerugian yang dilaporkan relatif lebih tinggi dibanding dana yang dapat diblokir. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko keamanan transaksi digital masih perlu diperhatikan. Risiko tersebut dapat memengaruhi keyakinan UMKM dalam menggunakan atau menyediakan QRIS sebagai metode pembayaran pada kegiatan usaha.

Kondisi keamanan transaksi digital tersebut menunjukkan pentingnya persepsi keamanan dalam penggunaan pembayaran berbasis QR. Fenomena ini juga muncul dalam ulasan pengguna aplikasi dan komentar masyarakat di media sosial

yang membahas pengalaman saat menggunakan QRIS. Beberapa ulasan tersebut digunakan sebagai gambaran pendukung untuk menunjukkan bentuk kendala yang terjadi dalam transaksi QRIS. Gambaran tersebut disajikan pada Gambar 1.3 yaitu sebagai berikut.



Sumber: Ulasan pengguna aplikasi dan media sosial, diolah peneliti April 2026.

Gambar 1. 3

Komentar dan Ulasan Terkait Kendala Pembayaran QRIS

Berdasarkan Gambar 1.3, kendala yang muncul dalam penggunaan QRIS berkaitan dengan proses transaksi yang belum sepenuhnya berjalan lancar, seperti pembayaran yang belum terkonfirmasi, saldo yang sudah terpotong, koneksi

terputus, dan kode QRIS yang tidak muncul. Kondisi tersebut dapat memengaruhi rasa aman UMKM dalam menerima dan memproses pembayaran digital. Oleh karena itu, persepsi keamanan menjadi salah satu aspek yang relevan untuk dikaji dalam keputusan penggunaan QRIS pada transaksi UMKM sektor kuliner.

UMKM menjadi bagian penting dalam perekonomian Indonesia karena aktivitasnya tersebar di berbagai sektor usaha dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Peran UMKM dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jumlah unit usaha serta penyerapan tenaga kerja. Indikator tersebut menunjukkan bahwa perkembangan UMKM tidak hanya berkaitan dengan jumlah pelaku usaha, tetapi juga dengan kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi. Data peranan UMKM disajikan pada Tabel berikut

Tabel 1. 2
Peranan UMKM dalam Perekonomian Indonesia Tahun 2020–2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Share PDB UMKM terhadap PDB Nasional	61,20%	60,01%	58,05%	58,60%	59,64%
Jumlah UMKM Nasional	50.249.028 unit	50.501.394 unit	53.670.730 unit	56.440.423 unit	56.142.687 unit
Jumlah Tenaga Kerja UMKM Nasional	113,3 juta orang	112,9 juta orang	116,6 juta orang	121,2 juta orang	121,8 juta orang

Sumber: <https://umkm.go.id/publikasi>, Diolah Peneliti April 2026

Berdasarkan Tabel 1.2, UMKM menunjukkan peranan besar dalam perekonomian Indonesia selama tahun 2020–2024. Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional berada pada kisaran 58% hingga 61%, sehingga menunjukkan peran kuat dalam pembentukan nilai ekonomi nasional. Jumlah UMKM juga meningkat dari 50.249.028 unit pada 2020 menjadi 56.142.687 unit pada 2024. Selain itu, tenaga kerja UMKM naik dari 113,3 juta orang menjadi 121,8 juta orang. Kondisi

ini menunjukkan bahwa penguatan UMKM perlu didukung melalui adaptasi ekonomi digital, termasuk penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran usaha.

Besarnya peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa sektor ini perlu dilihat lebih lanjut pada konteks daerah penelitian. Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang memiliki perkembangan usaha mikro pada sektor kuliner. Sektor kuliner relevan dengan penggunaan QRIS karena aktivitas transaksinya berlangsung langsung, cepat, dan berulang. Oleh karena itu, data usaha mikro sektor kuliner di Kota Bandung perlu disajikan untuk memberikan gambaran awal mengenai ruang transaksi pada wilayah penelitian.

Tabel 1. 3
Jumlah Usaha Mikro Sektor Kuliner di Kota Bandung

JUMLAH UMKM SEKTOR KULINER DI KOTA BANDUNG	
Tahun	Jumlah (Unit)
2022	3.464
2023	4.024
2024	4.763

Sumber: <https://opendata.bandung.go.id/>, Diolah Peneliti Januari 2026.

Berdasarkan Tabel 1.3 jumlah usaha mikro sektor kuliner di Kota Bandung menunjukkan tren peningkatan dari 3.464 unit pada 2022 menjadi 4.024 unit pada 2023, dan kembali naik menjadi 4.763 unit pada 2024 (Open Data Kota Bandung, 2024). Secara keseluruhan, peningkatan 2022–2024 mencapai 1.299 unit atau sekitar 37,5% yang mengindikasikan bahwa titik transaksi kuliner semakin bertambah dan aktivitas usaha di sektor ini semakin berkembang. Kondisi tersebut memperluas ruang transaksi ritel harian sehingga keputusan UMKM dalam

menyediakan metode pembayaran, termasuk QRIS, menjadi relevan untuk diamati dalam konteks transaksi kuliner.

Penelitian ini memfokuskan wilayah kajian pada Kecamatan Bandung Wetan setelah menjelaskan perkembangan usaha mikro sektor kuliner di Kota Bandung. Kecamatan Bandung Wetan memiliki tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Tamansari, Kelurahan Cihapit, dan Kelurahan Citarum. Data UMKM pada wilayah tersebut disajikan untuk mengetahui jumlah UMKM semua sektor dan jumlah UMKM sektor kuliner. Data ini juga digunakan untuk memperkuat alasan pemilihan Kelurahan Tamansari sebagai lokasi penelitian.

Tabel 1. 4
Jumlah UMKM Semua Sektor dan Sektor Kuliner di Kecamatan Bandung Wetan Tahun 2025

Kelurahan	Jumlah UMKM Semua Sektor	Jumlah UMKM Sektor Kuliner
Cihapit	22	4
Tamansari	190	116
Citarum	14	3
Total	226	123

Sumber: DISKOPUKM Kota Bandung, diolah peneliti Mei 2026.

Berdasarkan Tabel 1.4, Kecamatan Bandung Wetan memiliki 226 UMKM dari semua sektor dan 123 UMKM sektor kuliner. Kelurahan Tamansari memiliki jumlah UMKM paling banyak, yaitu 190 unit dari semua sektor dan 116 unit dari sektor kuliner. Kelurahan Cihapit memiliki 22 UMKM dari semua sektor dan 4 UMKM sektor kuliner. Kelurahan Citarum memiliki 14 UMKM dari semua sektor dan 3 UMKM sektor kuliner. Data tersebut menunjukkan bahwa Kelurahan Tamansari memiliki konsentrasi UMKM sektor kuliner paling tinggi di Kecamatan Bandung Wetan. Oleh karena itu, Kelurahan Tamansari relevan dijadikan lokasi

penelitian mengenai keputusan penggunaan QRIS pada transaksi UMKM sektor kuliner.

Data pada tabel sebelumnya menunjukkan bahwa Kelurahan Tamansari memiliki jumlah UMKM sektor kuliner paling tinggi di Kecamatan Bandung Wetan. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk melihat komposisi UMKM di Kelurahan Tamansari secara lebih rinci. Penyajian data berdasarkan bidang usaha diperlukan untuk mengetahui bidang usaha yang paling dominan di wilayah penelitian. Data tersebut juga memperkuat alasan pemilihan sektor kuliner sebagai fokus penelitian. Jumlah UMKM di Kelurahan Tamansari berdasarkan bidang usaha tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. 5
Jumlah UMKM di Kelurahan Tamansari Berdasarkan Bidang Usaha Tahun 2025

Bidang Usaha	Jumlah UMKM
Fashion	17
Handicraft	22
Jasa	6
Kuliner	116
Lain-lain	10
Perdagangan	19
Total	190

Sumber: DISKOPUKM Kota Bandung, diolah peneliti Mei 2026.

Berdasarkan Tabel 1.5 Kelurahan Tamansari memiliki 190 UMKM dari berbagai bidang usaha pada tahun 2025. Bidang fashion memiliki 17 unit. Bidang handicraft memiliki 22 unit. Bidang jasa memiliki 6 unit. Bidang kuliner memiliki jumlah UMKM paling banyak, yaitu 116 unit. Bidang lain-lain memiliki 10 unit. Bidang perdagangan memiliki 19 unit. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor

kuliner menjadi bidang usaha paling dominan di Kelurahan Tamansari. Oleh karena itu, sektor kuliner relevan menjadi fokus penelitian mengenai keputusan penggunaan QRIS pada transaksi UMKM sektor kuliner di Kelurahan Tamansari.

Sektor kuliner memiliki karakteristik transaksi yang cepat, langsung, dan berulang dalam kegiatan usaha sehari-hari. Karakteristik tersebut membuat metode pembayaran yang praktis menjadi penting untuk mendukung kelancaran transaksi. Dalam kondisi tersebut, QRIS menjadi salah satu metode pembayaran non tunai yang relevan digunakan oleh UMKM sektor kuliner. Oleh karena itu, keputusan UMKM dalam menggunakan atau menyediakan QRIS penting untuk diteliti pada transaksi usaha kuliner di Kelurahan Tamansari.

Keputusan penggunaan QRIS pada UMKM sektor kuliner tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sistem pembayaran digital. Keputusan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh kebiasaan pembayaran non tunai dan persepsi keamanan. Kebiasaan pembayaran non tunai dapat membentuk kecenderungan UMKM dalam menerima dan memproses transaksi digital secara berulang. Sementara itu, persepsi keamanan dapat memengaruhi keyakinan UMKM terhadap perlindungan data, keakuratan transaksi, bukti pembayaran, dan risiko gangguan dalam penggunaan QRIS.

Penelitian terdahulu mengenai pembayaran digital banyak membahas penggunaan QRIS, e-wallet, dan mobile payment dari sisi pengguna umum atau konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji konteks yang lebih spesifik, yaitu keputusan penggunaan QRIS pada transaksi UMKM sektor kuliner di Kelurahan Tamansari, Kota Bandung. Berdasarkan latar belakang, data sekunder,

fenomena keamanan transaksi digital, dan penelitian terdahulu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kebiasaan Pembayaran Non Tunai dan Persepsi Keamanan terhadap Keputusan Penggunaan QRIS pada Transaksi UMKM Sektor Kuliner di Kelurahan Tamansari, Kota Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Identifikasi masalah dan rumusan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan permasalahan utama yang menjadi dasar penelitian. Penelitian ini berfokus pada keputusan penggunaan QRIS pada UMKM sektor kuliner di Kelurahan Tamansari, Kota Bandung. Permasalahan tersebut ditinjau dari kebiasaan pembayaran non tunai dan persepsi keamanan sebagai faktor yang diduga memengaruhi keputusan UMKM dalam menggunakan atau menyediakan QRIS sebagai metode pembayaran usaha.

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penggunaan QRIS masih menghadapi kendala transaksi, seperti pembayaran belum terkonfirmasi, saldo terpotong, koneksi terputus, dan kode QRIS yang tidak muncul.
2. Keamanan transaksi digital masih menjadi perhatian karena laporan penipuan dan nilai kerugian transaksi digital terus meningkat sepanjang Januari sampai September 2025.

3. Kendala dan risiko keamanan transaksi digital dapat memengaruhi keyakinan UMKM dalam menggunakan atau menyediakan QRIS sebagai metode pembayaran usaha.
4. Transaksi UMKM sektor kuliner berlangsung cepat, langsung, dan berulang, sehingga membutuhkan kebiasaan pembayaran non tunai yang mendukung kelancaran transaksi.
5. Persepsi keamanan perlu diperhatikan karena penggunaan QRIS berkaitan dengan perlindungan data, keakuratan transaksi, bukti pembayaran, dan risiko gangguan pembayaran.
6. Penelitian terdahulu mengenai pembayaran digital masih banyak berfokus pada pengguna umum atau konsumen, sehingga perlu dikaji pada konteks UMKM sektor kuliner di Kelurahan Tamansari.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggapan UMKM sektor kuliner di Kelurahan Tamansari, Kota Bandung mengenai kebiasaan pembayaran non tunai?
2. Bagaimana tanggapan UMKM sektor kuliner di Kelurahan Tamansari, Kota Bandung mengenai persepsi keamanan?
3. Bagaimana tanggapan UMKM sektor kuliner di Kelurahan Tamansari, Kota Bandung mengenai keputusan penggunaan QRIS?

4. Seberapa besar pengaruh kebiasaan pembayaran non tunai terhadap keputusan penggunaan QRIS pada UMKM sektor kuliner di Kelurahan Tamansari, Kota Bandung?
5. Seberapa besar pengaruh persepsi keamanan terhadap keputusan penggunaan QRIS pada UMKM sektor kuliner di Kelurahan Tamansari, Kota Bandung?
6. Seberapa besar pengaruh kebiasaan pembayaran non tunai dan persepsi keamanan terhadap keputusan penggunaan QRIS pada UMKM sektor kuliner di Kelurahan Tamansari, Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah diatas adapun tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tanggapan UMKM sektor kuliner di Kelurahan Tamansari, Kota Bandung mengenai kebiasaan pembayaran non tunai.
2. Tanggapan UMKM sektor kuliner di Kelurahan Tamansari, Kota Bandung mengenai persepsi keamanan.
3. Tanggapan UMKM sektor kuliner di Kelurahan Tamansari, Kota Bandung mengenai keputusan penggunaan QRIS.
4. Besarnya pengaruh kebiasaan pembayaran non tunai terhadap keputusan penggunaan QRIS pada UMKM sektor kuliner di Kelurahan Tamansari, Kota Bandung.
5. Besarnya pengaruh persepsi keamanan terhadap keputusan penggunaan QRIS pada UMKM sektor kuliner di Kelurahan Tamansari, Kota Bandung.

6. Besarnya pengaruh kebiasaan pembayaran non tunai dan persepsi keamanan terhadap keputusan penggunaan QRIS pada UMKM sektor kuliner di Kelurahan Tamansari, Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bukan hanya untuk peneliti saja, tetapi bagi semua pihak yang berhubungan dengan peneliti ini, juga diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis. Adapun yang diharapkan peneliti sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan secara teoritis dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan memperkaya kajian ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Bisnis Digital terkait perilaku penggunaan dalam penggunaan sistem pembayaran digital (QRIS).
2. Memberikan gambaran berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kebiasaan pembayaran non tunai dan persepsi keamanan terhadap keputusan penggunaan QRIS, sehingga dapat memperkuat dasar teori pada penelitian sejenis.
3. Menjadi referensi dan bahan pembandingan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti topik serupa, terutama konteks UMKM sektor kuliner dan adopsi pembayaran digital di tingkat wilayah/kawasan tertentu.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat merasakan kegunaan dari penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pemahaman penulis mengenai perilaku dalam penggunaan QRIS pada transaksi kuliner. Selain itu, penulis memperoleh pengalaman dalam menyusun, mengolah data, menarik kesimpulan secara sistematis sebagai bekal akademik dan profesional.

2. Bagi UMKM Kuliner di Kelurahan Tamansari

Peneliti ini dapat menjadi masukan bagi pelaku UMKM kuliner untuk memahami faktor yang mendorong keputusan menggunakan atau menyediakan QRIS, terutama terkait kebiasaan pembayaran non tunai dan persepsi keamanan. Temuan penelitian dapat membantu UMKM menyesuaikan strategi layanan pembayaran agar transaksi usaha menjadi lebih nyaman, aman, dan efisien..

3. Bagi Pihak Lainnya

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak terkait seperti Bank Indonesia, penyedia jasa pembayaran, dan pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan adopsi QRIS. Hasil penelitian juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian pembayaran digital pada konteks transaksi harian.